

**DONOR**

Srikandi PLN saat akan mendonorkan darahnya dalam memperingati tahun baru Islam. (ist)

Srikandi PLN Sumbar Antusias Donorkan Darah

PADANG - SINGGALANG

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat melalui Program Srikandi Movement menunjukkan kepedulian terhadap sesama yang diwujudkan kolaborasi aktif pada bakti sosial donor darah yang berlangsung pada Selasa (09/07) di Aula Kantor Induk PLN UID Sumbar. Dalam acara tersebut terkumpul lebih dari 100 kantong darah.

Manager Komunikasi & TJSL PLN UID Sumbar Yenti Elfina sebagai wakil Champion Srikandi PLN mengatakan keterlibatan srikandi PLN dalam program bakti sosial yang berkolaborasi dengan PMI Kota Padang merupakan bentuk kepedulian serta aksi nyata

komunitas pegawai perempuan PLN dalam kegiatan aksi sosial guna meningkatkan semangat berbagi dan peduli dengan masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen PLN yang tidak hanya mengawal kean dalam sistem kelistrikan namun juga proaktif dalam menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan.

"Kegiatan yang digagas PLN UID Sumbar melibatkan para srikandi PLN baik pelaksanaan maupun peserta donor. Semangat para srikandi yang tidak hanya mengawal kelistrikan namun juga berpartisipasi mendonorkan darahnya untuk diserahkan kepada mereka yang membutuhkan. Srikandi PLN berkomitmen dalam menjawab permasalahan di lingkungan masyarakat, terlebih informasi yang kami terima saat ini masih banyak kurangnya kantong darah di Kantor PMI. Dengan harapan setetes darah yang diberikan memberikan harapan dan manfaat

bagi yang membutuhkan," ujar Yenti.

Sebelum melakukan donor darah, seluruh peserta harus mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan guna memastikan kesanggupan sebagai pendonor. Sebanyak lebih dari 100 orang yang terdiri dari pegawai PLN Group Kota Padang Padang, tenaga alih daya dan mitra kerja mengikuti kegiatan donor darah ini.

Eric Rossi Priyo Nugroho selaku General Manager PLN UID Sumbar mengapresiasi kegiatan positif ini dan mengucapkan terima kasih kepada pendonor, khususnya para Srikandi PLN yang berkolaborasi dengan PMI Kota Padang atas dukungan dan kolaborasi yang baik selama ini.

"Terima kasih kepada para Srikandi PLN yang berkolaborasi dengan PMI Kota Padang atas bantuannya sehingga bakti sosial donor darah dapat berlangsung secara rutin di PLN UID Sumbar. Harapan kami kegiatan sosial ini akan ber-

manfaat bagi banyak pihak, karena sejatinya, donor darah tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, namun selain berbagi, donor darah ini juga menyehatkan," ujar Eric.

PMI Kota Padang diwakili Dr Mimi Fitriani menyampaikan terima kasih kepada PLN UID Sumbar atas terlaksananya kegiatan ini, sehingga dapat membantu PMI untuk memenuhi kebutuhan darah saat ini.

"Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Srikandi PLN UID Sumbar yang terlihat sangat antusias membantu kami berkolaborasi melakukan kegiatan sosial ini, karena memang saat ini kami sedang membutuhkan banyak kantong darah. Alhamdulillah lebih dari 40 persen pendonor hari ini berasal dari Srikandi PLN dan Inshaallah Srikandi PLN semuanya sehat, tentu saja darah yang disumbangkan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Dr Mimi. (105)

MINIMALISIR TAWURAN

Pj Sekda Ingatkan Peran Keluarga

PADANG - Pj Sekda Padang, Yosefriawan, menekankan pentingnya peran keluarga dalam mencegah tawuran. Selain itu, orang tua dituntut untuk mengawasi anak-anaknya.

"Pemko Padang terus melakukan sosialisasi melalui RT RW, Kelurahan dan Kecamatan agar keluarga memperhatikan anak-anaknya agar tidak ikut terlibat aksi tawuran. Pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama dalam mencegah tawuran," jelas Pj Sekda Yosefriawan, Kamis (11/7).

Ia menekankan sosialisasi juga telah dilakukan secara masif seperti di masjid/musala bahkan menyasar ke sekolah.

Sementara itu, terkait wacana pemberlakuan jam malam, Yosefriawan menilai penetapan aturan tersebut tidak hanya pemerintah yang memutuskan.

"Penetapan jam malam juga melihat situasi, jika sudah begitu darurat barulah akan dikaji dan diberlakukan, perlu mengkaji lebih dalam. Pemerintah tidak bisa mengambil keputusan sendiri, harus dengan forkopimda dulu," katanya. (105)

HUT Kota Padang ke-355 Sinergitas Blue Economy and Green Economy

PADANG - Tanggal 7 Agustus adalah hari spesial untuk Kota Padang, tanggal yang ditetapkan sebagai hari jadi Ibu Kota Provinsi Sumbar tersebut. Hal itu sesuai dengan SK Walikota Padang No.188.452.25/SK-ESK/1986.

Berdasarkan SK itu, penetapan hari jadi tersebut merupakan simbol dari perjuangan masyarakat dari Pauh dan Koto Tengah yang membakar habis sebagian besar wilayah Kota Padang sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan Belanda. Peristiwa itu terjadi pada malam hari tanggal 7 Agustus 1669.

Pada 2024 ini, Kota Padang sudah memasuki usia yang ke-355, daerah dengan 11 kecamatan itu tidak hanya jadi pusat perokonomian Sumbar tapi juga sentral pendidikan yang terus berkembang pesat.

Momentum peringatan hari jadi selalu dimanfaatkan Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk terus berbenah dan memperbaiki diri demi kemajuan daerah dan kesejahteraan warganya. Untuk Hari Jadi ke-355 yang jatuh pada hari Rabu, Pemko Padang mengangkat tema Sinergitas Blue Economy and Green Economy.

Dipilihnya tema tersebut menunjukkan komitmen Pemko Padang untuk bersinergi dengan seluruh elemen untuk meningkatkan perekonomian di bidang kemaritiman. Juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

Pemko Padang kini dipimpin Penjabat (Pj) Wali Kota Andree Algamar yang dilantik pada 17 Mei 2024 lalu pasca berakhirnya masa jabatan Hendri Septa - Ekos Akbar juga akan melakukan berbagai kegiatan dan perayaan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan warganya pada peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-355, Rabu 7 Agustus 2024. (105)

PARIWARA



PADANG - SINGGALANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memulai pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

Pembahasan dimulai pasca telah diserahkan nota pengantar ranperda tersebut oleh Wakil Gubernur Sumbar dalam rapat paripurna, Rabu (10/7) di gedung dewan setempat.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib saat memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan KUA-PPAS Tahun 2025 memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyusunan APBD Tahun 2025 karena akan menjadi kebijakan anggaran transisi dari peralihan kepemimpinan daerah hasil Pilkada Tahun 2024 dengan kepala daerah yang menjabat saat ini.

Disamping itu, kebijakan anggaran Tahun 2025 juga akan menjadi transisi dari perubahan periodisasi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan Gubernur yang menjabat saat ini dengan RPJMD Gubernur hasil Pilkada Tahun 2024 yaitu RPJMD Tahun 2025-2030 yang



sejalan dengan periodisasi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Selain itu, penyusunan KUA-PPAS Tahun 2025 menjadi semakin kompleks karena target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 harus disesuaikan dan diselaraskan juga dengan target kinerja dari 45 indikator utama pembangunan daerah yang menjadi base line dalam RPJPD Provinsi Sumbar Tahun 2025-2045. RPJPD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2030.

Mengingat semua hal tersebut, lanjut Suwirpen, maka terlihat banyak kebijakan anggaran yang harus diakomodir dalam KUA-PPAS Tahun 2025. Termasuk pula kebijakan untuk pemenuhan target kinerja Gu-

berner dan Wakil Gubernur yang menjadi saat ini, maupun kebijakan anggaran untuk mengantisipasi adanya peralihan kepemimpinan daerah hasil Pilkada Tahun 2024.

Suwirpen menambahkan, dikarenakan KUA-PPAS Tahun 2025 memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyusunan APBD Tahun 2025, maka dalam penyusunannya Pemerintah Daerah harus berhati-hati baik dalam penetapan kebijakan anggaran maupun dalam penetapan proyeksi pendapatan dan belanja daerah dengan memperhatikan pelaksanaan APBD dalam beberapa tahun terakhir.

"Dalam dua tahun terakhir tersebut, proyeksi pendapatan daerah yang ditetapkan pada APBD awal dikurangi kembali pada Perubahan APBD dan di-

akhir tahunnya target yang ditetapkan tersebut juga tidak tercapai," katanya.

Kondisi ini menurut Suwirpen, tentu mengakibatkan banyak belanja yang sudah direncanakan menjadi tidak terlaksanakan karena mem-perkirakan penerimaan daerah.

DPRD terlibat ada beberapa persoalan yang terjadi dalam penyusunan APBD Sumbar dalam beberapa tahun terakhir. Diantaranya data pendukung yang tidak valid dan akurat, kebijakan yang kurang tepat serta kinerja organisasi perangkat Daerah (OPD) yang rendah.

"Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun 2025, agar permasalahan yang sama tidak terjadi lagi dalam pelaksanaan

APBD Tahun 2025," tegasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan proyeksi target pendapatan daerah karena untuk Tahun 2025 telah digunakan pola baru dalam pemungutan pajak daerah khususnya pada pos PKB, BBNKB dan MBLB. Pola yang digunakan yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yakni pola opsen.

Dalam KUA-PPAS juga akan memuat kondisi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah yang diusulkan pada tahun 2025 sejalan dengan target kinerja pembangunan daerah.

Ia memaparkan dari aspek pendapatan daerah, proyeksi penerimaan yang diusulkan dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 lebih rendah dari target tahun 2024, demikian juga dengan alokasi belanja yang disediakan.

"Ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan anggaran yang akomodatif, proporsional dan dapat mengakomodir semua kondisi dan permasalahan pembangunan daerah," ujarnya.

Oleh sebab itu, dalam pembahasan nanti DPRD dan pemerintah daerah perlu mencermati semua kondisi dan fungsi KUA-PPAS Tahun 2025 yang sangat strategis dalam penyusunan APBD Sumbar Tahun 2025.

DPRD berharap rancangan KUA-PPAS tahun 2025 ini akan dapat melahirkan kebijakan anggaran yang terbaik, yakni dapat mengatasi permasalahan dan mengakomodir semua kepentingan dalam pembangunan daerah. (*)